

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIANDRI

**(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor
803/Pdt.G/2019/PA.Grt)**

Oleh:

MOHAMAD JIMLY ASHIDDIQIE

E1A015052

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, artinya perkawinan menganut asas monogami, namun dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan cara pemalsuan surat maupun tidak dipenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan, yang dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan seperti pada Putusan Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Grt.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri pada Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Grt. Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena poliandri Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 803/Pdt.G/2019/PA.Grt, pertimbangan Hukum Hakim hanya mendasarkan pada Pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara ini dapat dilengkapi dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci : *Pembatalan, Perkawinan, Poliandri*

ABSTRACT

CANCELLATION OF MARRIAGE BECAUSE of POLYANDRI

(Juridical review of the Garut Religious Court Judgment Number 803 / Pdt.G / 2019 / PA.Grt)

By:

MOHAMAD JIMLY ASHIDDIQIE

E1A015052

Article 3 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that "In principle, a man may only have a wife. A woman can only have a husband ", meaning that the marriage adheres to the principle of monogamy, but in practice there are many marriages that violate the provisions contained in Article 3 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 by means of falsifying letters and not fulfilling the harmony and compliance conditions in marriage, which can result in the cancellation of marriage as in Decision Number 803/Pdt.G/2019/PA.Grt.

The formulation of the problem of this study is how the Judge's legal considerations in granting the cancellation of marriage due to polyandry in the Garut Religious Court Decision Number 803/Pdt.G/2019/PA.Grt. Normative juridical research methods, prescriptive analytical research specifications, collection of literature study data with an inventory, qualitative normative analysis.

Based on the results of research and discussion regarding the cancellation of marriage due to polyandry in the Garut Religious Court Decision Number 803/Pdt.G/2019/PA.Grt, Judge's legal considerations are only based on Article 71 letter (b) Compilation of Islamic Law. According to the investigators, the legal basis for the Judge's judgment in this case can be supplemented by Article 3 paragraph (1), Article 9, Article 22, and Article 24 of Law Number 1 of 1974.

Keywords: Cancellation, Marriage, Polyandry